



Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Penanganan Stunting dalam Menanggulangi Tingginya Angka Stunting di Kabupaten Nganjuk

Tria Maulana Zhara^{1*}, Alda Dewi Weston², Revienda Anita Fitrie³

^{1,2,3} Universitas Negeri Surabaya; tria.22103@mhs.unesa.ac.id, alda.22143@mhs.unesa.ac.id, reviendafitrie@unesa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mengurangi prevalensi angka stunting di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini mengacu pada teori Simon (1960) dalam Dermawan (2018:34) tentang proses pengambilan keputusan yang memiliki empat tahapan yang saling berhubungan. Metode penelitian ini kualitatif dengan melakukan studi literatur dan menggunakan analisis *fishbone*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis berdasarkan empat tahapan proses pengambilan keputusan kebijakan penanganan stunting, yakni *Intelligence, Design, Choice, Implementation* Pemerintah Kabupaten Nganjuk dinilai cukup berhasil dalam menanggulangi tingginya angka stunting di Kabupaten Nganjuk. Dengan memilih solusi berdasarkan penyelesaian akar masalah dan melakukan seluruh upaya penanganan stunting untuk menurunkan prevalensi stunting.

Kata Kunci: Pengambilan Keputusan, Kebijakan, Penanganan Stunting.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2395>

*Correspondence: Tria Maulana Zhara

Email: tria.22103@mhs.unesa.ac.id

Received: 06-12-2023

Accepted: 17-01-2024

Published: 28-02-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to identify the main problems in decision making regarding stunting management policies carried out by the Nganjuk Regency government to reduce the prevalence of stunting rates in Nganjuk Regency. This research refers to Simon's (1960) theory in Dermawan (2018:34) regarding the decision-making process which has four interconnected stages. This research method is qualitative by conducting a literature study and using fishbone analysis. The research results show that from the analysis based on the four stages of the policy decision making process for handling stunting, namely *Intelligence, Design, Choice, Implementation*, the Nganjuk Regency Government is considered quite successful in overcoming the high number of stunting in Nganjuk Regency. By choosing a solution based on solving the root of the problem and making all efforts to handle stunting to reduce the prevalence of stunting.

Keywords: Decision Making; Policy; Handling Stunting.

Pendahuluan

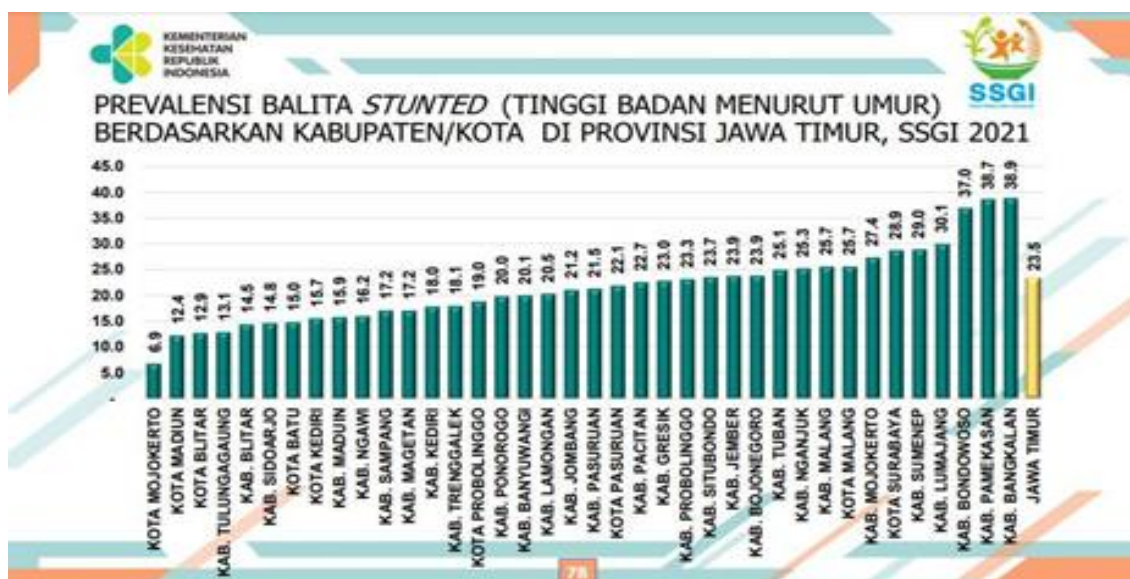
Stunting adalah istilah yang digunakan dalam konteks kesehatan masyarakat yang mengacu pada gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Hal ini menyebabkan anak tidak mencapai tinggi badan yang seharusnya. Menurut standar World Health Organization (WHO), seorang anak dikatakan stunting jika tinggi badannya menurut umur (diukur dengan HAZ-score) tertinggal 2 standar deviasi (SD) dari rata-rata standar pertumbuhan anak WHO (World Health Organization, 2010). Stunting diidentifikasi dengan membandingkan tinggi badan anak dengan standar yang sesuai dengan usia dan jenis kelamin yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan kronis yang disebabkan oleh masalah gizi dan kesehatan. Akibatnya, anak tidak dapat mencapai potensi tinggi badannya.

Terhambatnya pertumbuhan anak atau stunting dipicu oleh berbagai faktor, baik langsung maupun tidak langsung. Faktor langsung seperti asupan gizi dan infeksi yang berperan secara langsung, namun akar permasalahannya tidak hanya disitu. Faktor tidak langsung seperti pola asuh yang kurang tepat, gizi makanan yang buruk, kemiskinan, pendidikan rendah, sanitasi yang tidak memadai, pelayanan kesehatan yang buruk, hingga kondisi politik dan budaya pun ikut berkontribusi. Salah satu faktor kunci adalah rendahnya tingkat pengetahuan orangtua dalam menerapkan pola asuh yang tepat kepada anak (Dini et al., 2022). Berdasarkan penelitian (Ramdhani et al., 2020) terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan masalah stunting. Salah satu bukti kurangnya pengetahuan ibu terkait Stunting adalah tidak semua ibu melakukan kunjungan ke Posyandu. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang berpengaruh bagi pengetahuan ibu dalam mengasuh anak. Ibu dengan pengetahuan yang minim tentang gizi dan kesehatan anak lebih beresiko memiliki anak yang mengalami stunting. Tingginya prevalensi stunting di berbagai daerah menjadi bukti bahwa asupan gizi dan akses terhadap layanan kesehatan di tingkat keluarga masih belum optimal (Simbolon et al., 2022). Mengetahui dan memahami penyebab dan faktor risiko stunting pada anak menjadi hal yang sangat penting bagi calon ibu, wanita usia subur, ibu yang memiliki balita, serta tenaga kesehatan atau kader posyandu sebagai garda terdepan pendampingan ibu-ibu di posyandu.

Stunting bukan hanya tentang tinggi badan anak yang terhambat, tetapi juga tentang masa depan bangsa. Permasalahan ini memiliki dampak jangka panjang yang serius, seperti menghambat potensi bonus demografi, memperparah kemiskinan, dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi anak. Untuk itu, memahami stunting secara mendalam adalah kunci untuk mengatasinya. Hal ini mencakup mempelajari penyebab stunting, memahami nilai-nilai dan etika yang berkaitan dengan penanganan stunting, dan mengetahui langkah-langkah efektif untuk menurunkan tingkat stunting di Indonesia. Perlu juga memahami dampak pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka prevalensi stunting dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi masyarakat (Lanasa et al., 2023). Stunting memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak, yakni keterlambatan perkembangan fisik yang ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai dengan anak seusianya dan massa otot serta lemak yang berkurang. Kemudian mengalami keterlambatan perkembangan kognitif ditandai dengan kemampuan belajar yang menurun, dan memiliki IQ lebih rendah serta kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Lalu dampak lainnya yakni pada perkembangan motorik anak yang terhambat, sehingga mempengaruhi anak dalam bergerak dan melakukan aktivitas.

Penurunan stunting ditetapkan sebagai prioritas nasional, dan pemerintah merencanakan adanya RPJMN tahun 2020-2024, RKP tahun 2021, RKP tahun 2022 dan RKP tahun 2023 sebagai proyek prioritas dan proyek major sebagai upaya percepatan penurunan jumlah penderita stunting di Indonesia. Target yang tercantum di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan stunting yakni kurang lebih sebesar 14% pada tahun 2024. Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menunjukkan kenyataan pahit 24,4% balita di Indonesia mengalami stunting, setara dengan

5,33 juta balita. Angka ini menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia melampaui batas ketetapan WHO yakni 20%. Kemudian, prevalensi stunting di Jawa timur berada pada 23,5% (RI, 2021). Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu prioritas dari 12 Provinsi yang menjadi prioritas penurunan angka stunting dengan jumlah balita stunting tertinggi yakni 656.449 balita. Dikarenakan stunting merupakan permasalahan yang multisektoral sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan beberapa instansi yang berkaitan sehingga diperlukan adanya sinergitas kemitraan dan konvergensi dalam penanganan stunting di Jawa Timur.



Gambar 1. Data Prevalensi Stunting Balita di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu daerah yang memiliki prevalensi stunting di atas Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan survei status gizi yang dilaksanakan kementerian kesehatan pada tahun 2021 prevalensi stunting di Kabupaten Nganjuk sebesar 25,3%. Permasalahan stunting di Kabupaten Nganjuk menjadi hal yang serius karena prevalensinya berada di atas tingkat Nasional. Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Nganjuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan Stunting. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menangani stunting (Hidhayat, 2021).

Pertama, menerapkan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga dalam penanganan stunting. Strategi edukasi kesehatan dan gizi diterapkan sebagai upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, dengan sasaran yang paling utama yaitu keluarga. Tujuan strategi tersebut untuk membangun kemandirian keluarga (Sutoyo, 2021). Dalam hal ini kemandirian keluarga dibentuk melalui peningkatan kemampuan setiap keluarga untuk mengenali, mengevaluasi dan mengambil tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community provider, secara berkala terintegrasi dan berkelanjutan terkait stunting.

Kedua, untuk mempercepat penanganan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat dilakukan untuk mensinergikan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Gerakan masyarakat hidup sehat dilakukan dengan meningkatkan aktivitas fisik melalui olahraga dan aktivitas fisik lainnya secara teratur. Kemudian meningkatkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari alkohol dan rokok, serta istirahat yang cukup. Juga dengan menyediakan makanan sehat dan percepatan perbaikan gizi terutama untuk anak-anak, penguatan pencegahan dan deteksi dini penyakit melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin. Serta melakukan peningkatan kualitas lingkungan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat bagi diri dan keluarga.

Ketiga, Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mempercepat penanganan stunting. Gerakan ini berfokus pada Seribu Hari Pertama Kehidupan, periode kritis di mana pertumbuhan dan perkembangan otak anak paling pesat terjadi. Dilaksanakan melalui partisipasi dan kepedulian semua pemangku kepentingan, dan intervensi gizi yang terencana dan terkoordinasi dengan pemberian makanan bergizi, serta kerjasama dan sinergi antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Keempat, perubahan perilaku masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi komunikasi yang tepat untuk mendorong perubahan perilaku yang konsisten dan berkelanjutan. Strategi komunikasi dapat dilakukan melalui kampanye perubahan perilaku secara konsisten dan berkelanjutan dengan menyampaikan pesan edukasi tentang stunting secara menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kemudian dengan memastikan pengembangan pesan yang efektif melalui penyusunan pesan yang sesuai dengan target audiens menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan budaya lokal. Juga dengan pemilihan saluran komunikasi yang tepat seperti melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas. Serta melakukan pengukuran dampak komunikasi melalui evaluasi dan pemantauan secara berkala untuk mengukur efektivitas strategi komunikasi dan melakukan penyesuaian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk menurunkan prevalensi angka stunting di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan Fishbone Diagram Analysis sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas dalam rangka mengevaluasi penyebab suatu permasalahan. Diagram ini membantu memetakan hubungan sebab-akibat, sehingga memungkinkan untuk menelusuri akar permasalahan (root cause) dari suatu gejala yang terjadi.

Analisis Fishbone atau yang dikenal juga sebagai Ishikawa analysis adalah sebuah metode terstruktur yang membantu memahami akar permasalahan secara lebih mendalam. Metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap suatu masalah, sehingga solusi yang tepat dapat dirumuskan (Hamidy, 2016).

Diagram ini akan menunjukkan sebab dan akibat dari suatu masalah dengan mengidentifikasi penyebabnya. Dalam diagram ini permasalahan utama digambarkan sebagai kepala ikan, sedangkan faktor-faktor penyebabnya dianalogikan sebagai tulang-tulang ikan yang saling berhubungan dan mengarah ke kepala ikan. Kelebihan diagram Fishbone adalah mampu memvisualisasikan permasalahan yang terjadi secara jelas dan membantu memahami hubungan antar faktor penyebabnya dengan memetakan sebab-akibat. Sedangkan kekurangan dari penggunaan diagram Fishbone adalah penyusunannya masih dinilai subjektif karena berdasarkan opini dan pencarian akar penyebab secara umum saja, serta tidak dapat menampung semua faktor penyebab yang kompleks.

Untuk menentukan fokus, penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan menurut Simon (1960) dalam (Dermawan, 2018) tentang proses pengambilan keputusan dengan empat tahapan yang saling berhubungan dan berurutan diantaranya adalah *Intelligence, Design, Choice, Implementation*. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. *Intelligence* (Penelusuran)

Proses Penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Dalam tahap ini data diperoleh, diproses, dan diuji untuk mengidentifikasi masalah.

2. *Design* (Perencanaan)

Pada tahap ini dilakukan dengan menemukan dan mengembangkan alternatif solusi yang tepat. Untuk mengatasi permasalahan, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi.

3. *Choice* (Pemilihan)

Pada tahap ini dilakukan dengan memilih berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Tahap ini meliputi pencarian informasi, evaluasi solusi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah dibuat. Tahap pemilihan yang tepat akan menentukan keberhasilan dalam penyelesaian masalah.

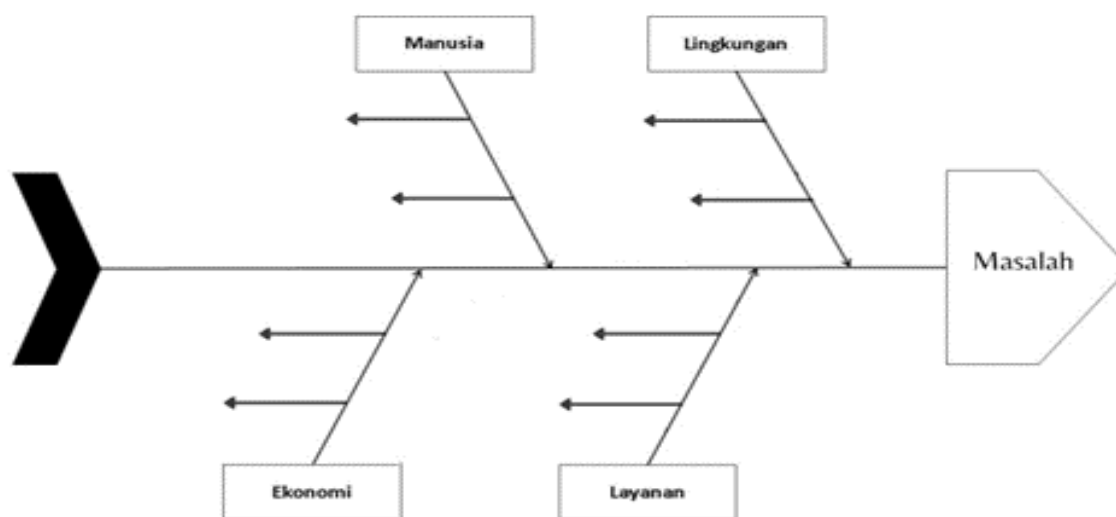
4. *Implementation* (Implementasi)

Tahap implementasi merupakan tahap melaksanakan serangkaian tindakan terencana dari keputusan yang telah diambil, untuk memastikan solusi tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Tahap implementasi ini dilakukan dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, dan pemantauan yang berkelanjutan. Dengan begitu maka dapat mewujudkan solusi yang membawa manfaat bagi semua pihak

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Nganjuk. Tujuannya adalah untuk menanggulangi tingginya angka stunting di daerah tersebut. Metode kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi, termasuk studi literatur, data stunting, dan dokumen terkait. Data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan data stunting dari jurnal nasional berbasis Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnal referensi adalah "stunting", "implementasi", "analisis",

“kebijakan penanganan stunting”. Penulis juga membatasi tahun penerbitan jurnal, yaitu antara 2018-2023. Data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber, yakni berupa dokumen, peraturan perundang-undangan terkait, laporan, dan sebagainya. Peneliti menganalisis dan memetakan data dan informasi yang didapatkan menggunakan diagram Fishbone. Sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Fishbone Analysis

Data yang diperoleh dengan kata kunci yang telah disebutkan yakni, penelitian yang dilakukan oleh (Nisa, 2018) dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi stunting, angka stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, mencapai 36%. Upaya penanggulangan stunting ini melibatkan intervensi spesifik dari sektor kesehatan dan intervensi sensitif dari sektor lain di luar kesehatan. Faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan pendapatan keluarga rendah juga berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di Indonesia. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Amelia, 2019) dengan judul “Prevalensi dan Zat Gizi Mikro dalam Penanganan Stunting”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balita di Asia Tenggara banyak yang mengalami stunting yaitu sebesar 29,1 % di tahun 2007. Sedangkan di Indonesia angkanya lebih tinggi, berdasarkan Direktorat Bina Gizi Kementerian Kesehatan RI sebesar 35,6% di tahun 2013. Hal ini membuat Indonesia termasuk negara dengan prevalensi stunting tinggi di ASEAN. Untuk mengatasi stunting dimulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah penyakit infeksi lalu memberikan asupan gizi yang optimal kepada balita. Memastikan balita mendapatkan zat gizi mikro penting seperti seng, vitamin A, zat besi dan kalsium.

Penelitian yang dilakukan oleh (Simamora & Kresnawati, 2021) dengan judul “Pemenuhan Pola Makan Gizi Seimbang dalam Penanganan Stunting Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kecamatan Rawalumbu Bekasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar balita di Puskesmas Bojong Rawalumbu Bekasi mendapatkan gizi seimbang sebesar (71,5%) dan penanganannya pun tergolong baik yaitu sebesar (79%). Analisa data

menunjukkan hubungan yang signifikan antara pemenuhan gizi seimbang dengan penanganan stunting pada balita di wilayah tersebut. Kesimpulannya, balita yang mendapatkan gizi seimbang lebih mungkin terhindar dari stunting. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Yuda et al., 2023) dengan judul “Tinjauan Literatur: Perkembangan Program Penanggulangan Stunting di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah berusaha memberantas stunting melalui berbagai program, seperti pemberian makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil. Namun, program-program ini masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti kekurangan tenaga kerja, keterlambatan dana, dan kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan, evaluasi, dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar program stunting lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan kasus stunting di Indonesia dapat dikurangi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hadina et al., 2022) dengan judul “Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah di Kabupaten Donggala berusaha mencegah dan menangani stunting melalui beberapa upaya. Dengan memastikan akses air bersih dan sanitasi melalui penyediaan air bersih bagi masyarakat, membangun jamban umum, dan membuat selokan pembuangan limbah. Juga meningkatkan akses layanan kesehatan dengan memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin, menugaskan bidan pendamping bidan desa, dan meningkatkan akses layanan kesehatan ibu dan anak. Lalu meningkatkan edukasi dan penyuluhan melalui pemberian pendidikan pengasuhan orang tua, edukasi kesehatan seksual dan edukasi reproduksi remaja. Dan melakukan intervensi gizi dengan pemberian tindakan spesifik perbaikan gizi bagi balita stunting. Namun, program-program ini masih belum maksimal dilaksanakan. Diharapkan pihak puskesmas dapat bekerja sama untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Donggala. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Dini et al., 2022) dengan judul “Penurunan Prevalensi Stunting di Desa Sudimoroharjo Kabupaten Nganjuk Sebagai Luaran Program Pendampingan Intensif Lintas Sektor Kepada Ibu Dengan Balita Stunting”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sudimoroharjo, sebesar 13,5% balita mengalami stunting. Untuk mengatasinya, dilakukan program pendampingan yang meliputi: penyuluhan isi piringku tentang prinsip makanan bergizi seimbang di setiap posyandu setiap hari, pendampingan stunting dengan kunjungan rumah ke rumah untuk memberikan edukasi, melakukan layanan konsultasi gizi setiap hari di puskesmas pembantu (pustu). Hasilnya, setelah program pendampingan secara langsung ibu-ibu di Desa Sudimoroharjo lebih memahami cara menerapkan pola makan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) bagi balita mereka. Hal ini terbukti dengan menurunnya prevalensi stunting di desa tersebut menjadi 9,21%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurva & Maharani, 2023) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan di daerah sudah sesuai dengan peraturan, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan OPD terkait. Namun, masih banyak kendala yang dihadapi sehingga kebijakan ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati

agar selaras dengan Peraturan Presiden terbaru, yaitu Perpres No. 72 Tahun 2021. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Lanasa et al., 2023) dengan judul “Analisis Kebijakan Stunting Melalui Pendekatan Filsafat dan Pengambilan Keputusan Dalam Penanganan Masalah Kesehatan Anak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stunting dikaji dari berbagai aspek, yaitu ontologis dari mencari penyebab terjadinya stunting, epistemologi menjadikan stunting sebagai bidang ilmu baru, aksiologi mempelajari dampak ilmiah stunting. Penelitian ini juga menemukan hubungan antara pendekatan filsafat dengan pengambilan keputusan pemerintah dalam menangani stunting, evaluasi dilakukan pada tahun 2030 untuk mengukur pencapaian target dan memastikan keberlanjutan upaya pencegahan stunting secara holistik dan integratif. Evaluasi pengambilan keputusan pemerintah melalui kebijakan stunting dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Ini erat kaitannya dengan penanganan masalah kesehatan anak dalam penilaian pengambilan keputusan, karena melibatkan analisis data, kolaborasi antar pemangku kepentingan, infrastruktur, intervensi kesehatan, program prioritas, dan upaya pengentasan kemiskinan. Kesimpulannya, stunting adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan filsafat yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam penanganannya.

Hasil dan Pembahasan

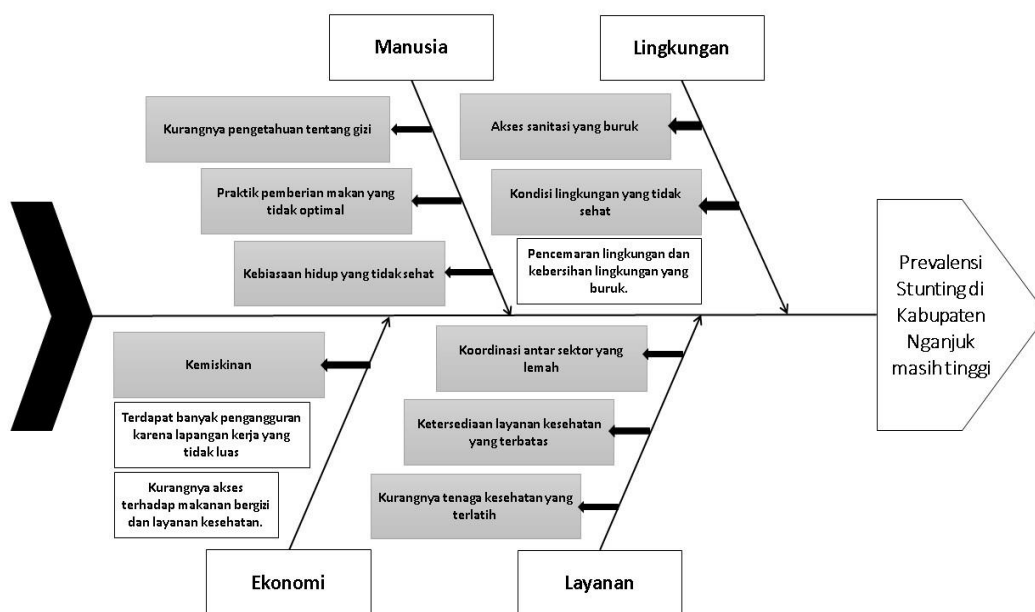
Stunting adalah suatu kondisi dimana pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun mengalami gangguan akibat kekurangan gizi. Hal ini baru terlihat ketika anak berusia dua tahun. Dua tahun pertama kehidupan yang disebut sebagai periode emas, sangatlah penting karena menentukan kualitas hidup anak di masa depan. Masa ini juga merupakan masa sensitif, karena kekurangan gizi pada masa ini dapat menyebabkan kerusakan permanen yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, pemenuhan nutrisi yang tepat sangat penting pada usia ini.

Stunting bukan hanya masalah kesehatan anak, tetapi juga ancaman serius bagi masa depan bangsa. Pengaruhnya tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik tetapi juga perkembangan otak, yang mempengaruhi kemampuan belajar, prestasi akademik, produktivitas, dan kreativitas di usia produktif. Anak yang mengalami stunting lebih rentan terserang penyakit dan berisiko lebih tinggi terkena penyakit degeneratif di masa depan. Oleh karena itu, stunting merupakan indikator penting buruknya kualitas sumber daya manusia suatu negara. Stunting pada anak balita seringkali merupakan akibat dari banyak faktor yang berhubungan dengan kemiskinan. Ini termasuk pola makan yang buruk, kesehatan, kebersihan dan lingkungan (Kemenkes, 2018).

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting, dengan angka mencapai 9,54% di tahun 2022. Untuk itu, Kementerian Kesehatan dan BKKBN bekerja sama melaksanakan berbagai inisiatif untuk menurunkan angka stunting yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Upaya seperti pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri dilakukan untuk meningkatkan kesehatan remaja putri sebagai calon ibu, sehingga dapat melahirkan anak yang sehat dan terhindar dari stunting. Kemudian melakukan pemeriksaan kehamilan dan pemberian

asupan tambahan untuk ibu hamil agar dapat memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi dan zat besi yang cukup untuk kesehatan ibu dan janin, sehingga dapat mencegah stunting sejak dalam kandungan. Selanjutnya dengan memberikan makanan tambahan protein hewani kepada anak usia 6-24 bulan agar dapat memenuhi kebutuhan protein anak di masa pertumbuhannya, sehingga dapat meningkatkan perkembangan otak dan fisik anak. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan stunting secara bersamaan. Kepala BKKBN juga menekankan bahwa pemerintah berupaya memitigasi potensi dampak negatif dari kebijakan ini, termasuk kesenjangan akses dan potensi penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia (Lanasa et al., 2023).

Pada saat proses implementasi kebijakan penanganan stunting, masih terdapat kendala atau permasalahan yang menjadi faktor penyebab tingginya angka stunting di Indonesia khususnya di Kabupaten Nganjuk. Setelah mengidentifikasi dan mendefinisikan rumusan masalah, selanjutnya dilakukan pemetaan masalah dengan membuat diagram fishbone. Gambar 3 menunjukkan aspek manusia, ekonomi, lingkungan, dan layanan.



Gambar 3. Hasil Analisis Diagram Fishbone

Setelah menyusun diagram fishbone, kemudian langkah selanjutnya yakni mengidentifikasi masalah dan akar masalah yang ada (Nurfindarti, 2022). Di bawah ini adalah hasil analisis *Fishbone Root Cause Analysis* yang merupakan hal terpenting dalam proses penerapan kebijakan penanganan stunting untuk mengatasi tingginya angka stunting di Kabupaten Nganjuk. Berikut penentuan akar masalah utamanya:

A. Aspek manusia

Permasalahan yang ada pada aspek ini yakni, kurangnya edukasi pengetahuan dan akses informasi tentang gizi kepada masyarakat. Terdapat pemberian makan yang tidak optimal dengan memberikan makanan yang tidak bergizi seimbang dan tidak sesuai usia anak. Selain itu, terdapat masyarakat yang

memiliki kebiasaan hidup tidak sehat dengan kebiasaan merokok dan minum alkohol serta aktivitas fisik yang kurang.

B. Aspek ekonomi

Permasalahan yang ada pada aspek ini yakni, kemiskinan yang terjadi karena terdapat banyak pengangguran yang disebabkan oleh lapangan kerja tidak menyeluruh ke beberapa daerah di Kabupaten Nganjuk. Sehingga masyarakat memiliki akses yang terbatas terhadap makanan bergizi dan kualitas layanan kesehatan yang memadai.

C. Aspek lingkungan

Permasalahan yang ada pada aspek ini yakni, masyarakat mendapatkan akses sanitasi yang buruk karena akses air bersih dan jamban yang sehat masih terdapat kekurangan. Dan juga masyarakat bertempat tinggal di lingkungan dengan kondisi yang tidak sehat, karena masih terdapat pencemaran lingkungan serta kebersihan yang tidak dijaga dengan baik.

D. Aspek layanan

Permasalahan yang ada pada aspek ini yakni, koordinasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat yang masih lemah dalam menangani stunting. Hal itu membuat akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi terbatas untuk masyarakat. Dan terdapat tenaga kerja yang tidak terlatih karena mendapatkan edukasi dan pelatihan yang kurang tentang stunting.

Dari penjelasan permasalahan di tiap aspeknya, dapat ditetapkan penyebab yang paling dominan dan menjadi akar permasalahan pada pelaksanaan kebijakan penanganan stunting dalam menanggulangi tingginya angka stunting di Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Masyarakat kurang mendapatkan edukasi pengetahuan dan akses informasi tentang gizi yang seimbang.
2. Terdapat banyak pengangguran yang membuat kemiskinan semakin tinggi, sehingga masyarakat memiliki akses terbatas terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan.
3. Masyarakat masih mendapatkan akses sanitasi yang buruk, karena terdapat keterbatasan akses air bersih dan jamban yang sehat.
4. Koordinasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat yang kurang optimal, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang kurang berkualitas.

Setelah menemukan masalah dan akar permasalahannya, kemudian dilakukan analisis ulang dengan menggunakan teori Rasionalitas Herbert Simon (1960) dalam (Dermawan, 2018) yang menjelaskan bahwa individu dan organisasi tidak selalu mampu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional, karena adanya keterbatasan kognitif, informasi, dan waktu. Teori rasionalitas ini memiliki 4 (Empat) tahapan:

1. Intelligence (Penelusuran)

Menurut Simon (1960) dalam (Dermawan, 2018) Intelligence bukan hanya proses pengenalan masalah, tetapi juga proses pelacakan dan pengenalan ruang lingkup masalah.

Data masukan dikumpulkan, diproses, dan diuji untuk mengidentifikasi masalah. Pada tahap Intelligence ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyelidiki permasalahan stunting yang masih terjadi di beberapa desa dengan menggunakan data dari beberapa penelitian yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Berdasarkan Survei Status Gizi yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 25 Januari 2023, Kementerian Kesehatan mengumumkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6% pada tahun 2022. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan nilai tahun 2021 yaitu sebesar 24,4 %. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi anak balita stunting di Indonesia menjadi 14% pada tahun 2024. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa target 14% bukanlah target yang sulit dicapai jika seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama (Kementerian Kesehatan, 2023). Sedangkan menurut survei status gizi yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Nganjuk sebesar 25,3%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan prevalensi stunting di Indonesia yang sebesar 24,4%.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan 28 desa di 20 kecamatan sebagai wilayah sasaran intervensi stunting pada tahun 2022. Secara umum, tren prevalensi stunting di Nganjuk didasarkan pada pengukuran berat badan bayi setiap bulan dengan menggunakan catatan elektronik dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Gizi mengalami penurunan sejak tahun 2018, turun dari 16,1% menjadi 9,63% pada tahun 2022 (Diskominfo Nganjuk, 2022).

Simon (1993) menganggap pengambilan keputusan merupakan suatu bentuk pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dilakukan dan mengolahnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan diperoleh keputusan yang terbaik. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu penandatanganan komitmen dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menyelenggarakan Konsultasi Stunting Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 di Ruang Rapat Anjuk Ladang. Penandatanganan komitmen ini dilakukan memperkuat upaya penanganan dan pencegahan stunting di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sehingga dapat menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Nganjuk dan menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi. Tim percepatan stunting berperan penting mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Namun, diharapkan tim mampu menjalankan tugas dengan sukses. Dengan adanya tim percepatan stunting yang besar, diharapkan seluruh kelompok masyarakat dapat terwakili. Sehingga memungkinkan mereka melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya (Romza, 2022).

2. Design (Perancangan)

Menurut Simon (1960) dalam (Dermawan, 2018), tahap ini merupakan proses eksplorasi dan pengembangan alternatif. Fase ini melibatkan pemahaman masalah, pengembangan solusi, dan pengujian kelayakan solusi. Perencanaan dan rancangan implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Nganjuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang merupakan salah satu akar permasalahan di Kabupaten Nganjuk. Wilayah Nganjuk yang mencakup sektor kesehatan masih memiliki prevalensi stunting

yang tinggi, dengan data stunting pada balita sebesar 10 persen. Berdasarkan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan setiap 5 tahun, terlihat bahwa stunting masih menjadi permasalahan di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu dari 100 Kabupaten/Kota prioritas penanganan stunting di seluruh provinsi. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan lokal di Kabupaten Nganjuk, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG), terutama untuk meningkatkan sinergi berbagai sektor. Tujuan dari RAD-PG antara lain mencegah kerawanan pangan, stunting, dan kemiskinan (Bupati Nganjuk, 2022).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2020-2024, terdapat beberapa poin kebijakan dalam revisi RPJMD Kabupaten Nganjuk, termasuk upaya penurunan stunting. Oleh karena itu, sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Bappenas meminta Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kecamatan/ desa mana yang menghadapi kerawanan pangan, stunting, dan tingkat kemiskinan tinggi. Dibawah ini data 20 desa dengan tingkat kemiskinan tertinggi, digabungkan dengan desa yang mengalami stunting dan kerawanan pangan, sehingga diperoleh satu desa yaitu desa Tritik.

| No | DESA STUNTING 2020 | DESA MISKIN TAHUN 2020 | DESA KERAWANAN DAN KERENTANAN PANGAN | IRISAN DESA STUNTING, DESA MISKIN, DESA KERAWANAN DAN KERENTANAN PANGAN |
|----|--------------------|------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | Banjarejo | Kedungmlaten | Tritik | tritik |
| 2 | Wengkal | Lestari | Ngepung | |
| 3 | Bendolo | Tritik | Jegreg | |
| 4 | Tritik | Ngluyu | Bajulan | |
| 5 | Gampeng | Godean | | |
| 6 | Ngepung | Patihan | | |
| 7 | Ngudikan | Banjarejo | | |
| 8 | Puhkerep | Kalianyar | | |
| 9 | Sukoharjo | Gempol | | |
| 10 | Drenges | Ganungkidul | | |
| 11 | Musir lor | Kedung padang | | |
| 12 | Klagen | Talun | | |
| 13 | Margopatut | Talang | | |
| 14 | Wilangan | Musir kidul | | |
| 15 | Godean | Wengkal | | |
| 16 | Ngadiboyo | Jintel | | |
| 17 | Sukorejo | Sukorejo | | |
| 18 | Sudimoroharjo | Gampeng | | |
| 19 | Jintel | Musir lor | | |
| 20 | Juwet | Blongko | | |

Gambar 4. Tabel Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan Desa Stunting dan Desa Rawan Pangan Kabupaten Nganjuk

Solusi atau alternatif yang diajukan Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah dengan melakukan berbagai upaya penanggulangan stunting, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan Stunting. Kemudian upaya tersebut diuji kelayakannya dengan melibatkan berbagai sektor sebagai pendukung dan program-program lain yang dilaksanakan secara terbuka. Dengan bertanggung jawab penuh atas sosial budaya gizi wilayah tersebut.

3. Choice (Pemilihan)

Sebagaimana dikemukakan Simon (1960) dalam (Dermawan, 2018), pada tahap ini terjadi proses seleksi antara berbagai alternatif yang layak. Pada fase ini, solusi yang sesuai

untuk model yang dibuat dieksplorasi, dievaluasi, dan direkomendasikan. Solusi dari model tersebut adalah nilai spesifik dari variabel hasil untuk alternatif yang dipilih. Menurut Wang dan Ruhe (2007) dalam (Riadi, 2018), pengambilan keputusan adalah proses pemilihan tindakan yang disukai dari alternatif berdasarkan kriteria atau strategi yang telah ditentukan.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melakukan beberapa inisiatif untuk menangani stunting yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan Stunting (Hidayat, 2021). Pertama, strategi pendidikan kesehatan dan gizi dilaksanakan melalui kemandirian keluarga dalam memerangi stunting. Strategi ini diterapkan sebagai upaya promosi dan pencegahan melalui intervensi untuk mengubah perilaku individu dan masyarakat, menyentuh sasaran terpenting yaitu keluarga. Kemandirian keluarga adalah pengembangan kemampuan anggota keluarga untuk secara mandiri mengenali, mengevaluasi, dan mengambil tindakan secara teratur, berkelanjutan, dan terpadu melalui kerja sama dengan tenaga kesehatan dan penyedia layanan masyarakat. Kemandirian keluarga dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: 1) Seberapa besar keluarga menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan gizi bagi anggota keluarga; 2) Seberapa besar keluarga mengetahui jika ada anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan dan gizi; 3) Seberapa besar pengetahuan keluarga tentang cara mengatasi masalah kesehatan dan gizi pada anggota keluarganya; dan 4) Seberapa besar keluarga berusaha untuk menggunakan dan mengakses layanan kesehatan yang tersedia.

Edukasi kesehatan dan gizi menjadi upaya penanganan stunting yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk karena masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi pengetahuan dan akses informasi tentang gizi yang seimbang. Akibatnya, pemberian makan tidak optimal karena tidak sesuai dengan kebutuhan gizi dan usia anak. Edukasi kesehatan dan gizi dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan demonstrasi pembuatan makanan tambahan yang bergizi. Diharapkan melalui kegiatan ini, kelompok sasaran (ibu hamil dan balita) dan masyarakat setempat dapat dengan senang hati menyediakan makanan bergizi bagi keluarganya dengan menggunakan bahan-bahan lokal.

Kedua, dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat untuk mempercepat penanganan stunting. Gerakan masyarakat hidup sehat merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dalam memerangi stunting. Gerakan masyarakat hidup sehat berfokus pada meningkatkan aktivitas fisik, meningkatkan pola hidup sehat, menyediakan makanan sehat dan meningkatkan gizi, memperkuat pencegahan dan deteksi dini penyakit, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat dilaksanakan dan dipromosikan oleh Dinas terkait, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.

Adanya masyarakat yang masih tinggal di lingkungan dengan kondisi yang tidak sehat serta akses sanitasi yang buruk merupakan hal yang harus diperhatikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, Gerakan masyarakat hidup sehat menjadi pendekatan preventif yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menjaga

kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Ini menjadi program yang relatif efektif dan efisien dalam menjangkau masyarakat luas dengan pesan-pesan kesehatan. Pola hidup sehat yang diadvokasi dalam Germas, seperti pola makan seimbang, olahraga teratur, dan kebiasaan hidup bersih, merupakan faktor penting dalam pencegahan stunting. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Nganjuk tentang pentingnya hidup sehat dan dampaknya terhadap kesehatan anak-anak.

Ketiga, Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan. Seribu hari pertama kehidupan merupakan masa emas untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Masa seribu hari pertama kehidupan merupakan periode kritis dalam kehidupan anak, di mana pertumbuhan dan perkembangan otak mereka berlangsung sangat pesat. Oleh karena itu, periode ini sering disebut sebagai Golden Age, karena menentukan kualitas hidup anak di masa depan. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah inisiatif partisipatif yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat setempat untuk mempercepat penanganan stunting. Gerakan ini berfokus pada peningkatan kesadaran akan kebutuhan gizi janin dan bayi selama seribu hari pertama kehidupan, dan intervensi gizi sejak konsepsi hingga tahun kedua kehidupan dengan memberikan asupan gizi yang tepat dan seimbang untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelaksanaan gerakan seribu hari pertama kehidupan dilakukan dengan upaya terarah dan terkoordinasi. Perilaku seribu hari pertama kehidupan sebaiknya diperkenalkan kepada ibu rumah tangga yang berada di masa seribu hari pertama kehidupan, karena berdampak pada status gizi balita, terutama yang berusia di bawah 2 tahun. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan edukasi yang berfokus pada ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh anak.

Masa 1000 HPK merupakan masa kritis bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Anak-anak yang lahir dalam kemiskinan seringkali mempunyai risiko lebih tinggi terhadap malnutrisi, penyakit, dan keterlambatan perkembangan. Melalui Gerakan 1000 HPK, pemerintah dapat memastikan pemerataan program seperti layanan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, serta pendidikan tentang gizi dan perawatan anak. Dengan memberikan dukungan yang tepat pada masa kritis ini, dapat membantu menutup kesenjangan kesehatan dan perkembangan antara anak-anak dari keluarga miskin dan kaya.

Keempat, menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk mempercepat pencegahan stunting. Strategi komunikasi dapat diwujudkan melalui kampanye perubahan perilaku masyarakat yang konsisten dan berkelanjutan dengan mengembangkan pesan yang tepat dan sesuai dengan target audiens, memilih saluran komunikasi yang efektif untuk menjangkau target audiens, mengukur dampak komunikasi untuk memastikan efektivitas kampanye, dan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dalam penyampaian pesan. Komunikasi interpersonal yang sesuai dengan konteks sasaran, seperti melalui posyandu, kunjungan rumah, penyuluhan pernikahan, dan penyuluhan reproduksi remaja dengan memastikan bahwa pesan yang disampaikan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Melakukan penjangkauan sistematis kepada para pengambil keputusan seperti Bupati, Camat, Kepala Desa, serta tokoh agama dan masyarakat. Kemudian memastikan

advokasi dan alat bantu yang berkelanjutan untuk mendukung kampanye perubahan perilaku. Lalu, mengembangkan kapasitas dan komunikasi perubahan perilaku bagi penyelenggara kampanye. Memberdayakan pengelola program dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan untuk mengkomunikasikan perubahan perilaku secara efektif dan efisien. Memperhatikan konteks lokal dalam pengembangan kapasitas dan pelatihan.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat kurang optimal sehingga menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menerapkan strategi komunikasi perubahan perilaku untuk mempercepat pencegahan stunting. Penerapan upaya tersebut memerlukan kolaborasi yang optimal antara pengambil keputusan, pengelola program, dan penerima program untuk memastikan pengembangan pesan yang efektif dan efisien, pemilihan saluran komunikasi, serta pengukuran dampak komunikasi yang efektif dan efisien.

4. Implementation (Pelaksanaan)

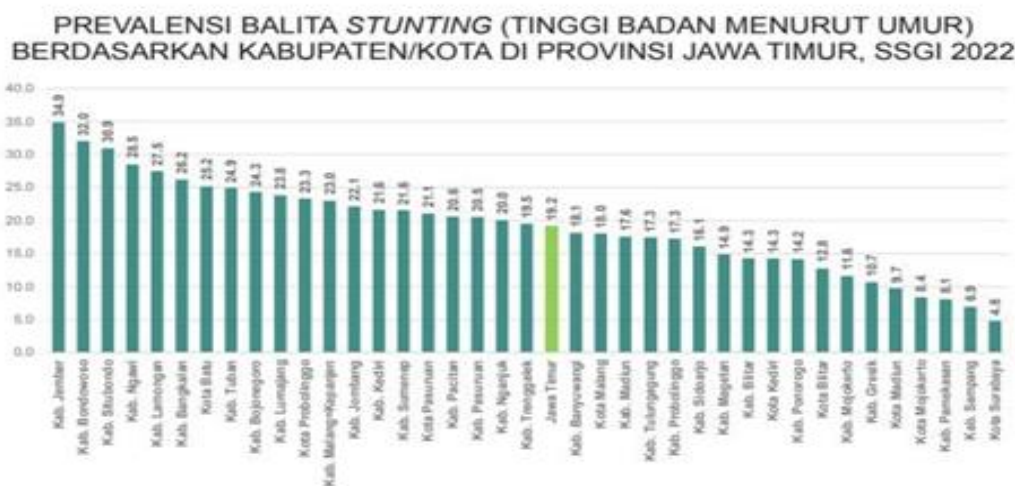
Menurut Simon (1960) dalam (Dermawan, 2018) tahapan implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap implementasi perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan.

Dalam upaya menangani stunting, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan program unggulannya yang berfokus pada edukasi kesehatan dan gizi untuk penanganan stunting dengan menggandeng dinas kesehatan, BKKBN serta instansi yang terkait dalam penanganan stunting. Sasaran utama edukasi adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki bayi dan calon pengantin. Salah bentuk implementasi penanganan stunting oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk yakni sosialisasi melalui Dinas Kesehatan dengan melakukan talkshow melalui radio. Sosialisasi yang diberikan untuk mengedukasi serta memberi pedoman terkait pencegahan stunting. Pedoman pencegahan diberikan dalam bentuk buku saku dan brosur. Selain itu, Pemerintah juga membuat kegiatan pendukung seperti perlombaan melalui media sosial untuk mendukung gerakan masyarakat hidup sehat.

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui penandatanganan pernyataan komitmen bersama oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait. komitmen ini menjadi bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mengatasi masalah Stunting di daerahnya. Dalam menjalankan komitmen ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkoordinasi dengan dinas-dinas yang terkait dalam penanganan stunting. selain itu, Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan masuk dalam perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Selanjutnya, melakukan komunikasi, edukasi dan pemberian informasi melalui kampanye di berbagai media mengenai bahaya stunting serta bagaimana cara mencegah stunting. Selain itu, pemerintah juga memberi penghargaan bagi masyarakat peduli penanganan stunting

Kolaborasi antar sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat juga dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Nganjuk. Dimana setiap aktor sosial menyepakati peran yang harus dilaksanakan oleh masing-masing aktor sosial dari berbagai

sektor. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih peran. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan dan regulasi, serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung program-program penanganan stunting. Swasta berperan sebagai pendukung program-program penanganan stunting, seperti mengadakan kampanye penyuluhan atau menyediakan makanan bergizi. Sedangkan, masyarakat dapat mengambil peran aktif dalam penerapan praktik-praktik gizi yang sehat di tingkat rumah tangga, seperti menyediakan makanan bergizi dan memberikan asuhan yang baik kepada anak-anak. Namun, terdapat hambatan yang dihadapi pelaku sinergi lintas sektor dalam percepatan penanganan stunting yakni konstruksi pengetahuan dan perilaku orang tua terkait pola asuh anak yang masih lemah. Beberapa upaya penanganan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat dinilai cukup berhasil dalam menurunkan prevalensi stunting di Nganjuk.



Gambar 5. Data Prevalensi Stunting Balita di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia pada tahun 2022 Kabupaten Nganjuk berhasil menurunkan prevalensi stunting mencapai 20% pada Tahun 2022 dimana capaian ini mengalami penurunan dari Tahun 2021 25,3%. Penurunan prevalensi di Nganjuk sebanyak 5,3% menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk berhasil menurunkan angka stunting di Nganjuk.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada pengambilan keputusan terkait kebijakan penanganan stunting dalam menanggulangi tingginya angka stunting di Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan yaitu: (1). Intelligence (Penelusuran): Melalui data dari beberapa studi yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Berdasarkan studi status gizi yang dilaksanakan kementerian kesehatan (kemenkes) pada tanggal 25 Januari 2023, Kementerian Kesehatan mengumumkan prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Angka ini lebih rendah daripada angka pada tahun 2021 yaitu sebesar 24,4 persen. Sedangkan di Kabupaten Nganjuk Angka

prevalensi stunting berdasarkan studi status gizi yang dilaksanakan kementerian kesehatan (kemenkes) tahun 2021, sebesar 25,3%. Jumlah ini lebih besar daripada prevalensi stunting di Indonesia. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melakukan penandatanganan komitmen untuk memperkuat komitmen penanganan stunting dengan pihak terkait. (2). Design (Perancangan): Dituangkan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023, yang didalamnya memuat salah satu akar permasalahan pada bidang kesehatan yakni tingginya prevalensi stunting dengan data balita stunting sebesar 10 persen. (3). Choice (Pemilihan): Solusi yang dipilih sebagai upaya penanganan stunting berdasarkan pada penyelesaian akar masalah penyebab stunting di Nganjuk serta berfokus pada kebutuhan prioritas masyarakat. (4). Implementation (Pelaksanaan): Beberapa upaya penanganan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat dinilai cukup berhasil dalam menurunkan prevalensi stunting di Nganjuk. Penurunan prevalensi sebanyak 5,3% menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam upaya penanganan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk tepat untuk dilaksanakan dalam menangani masalah stunting di daerah tersebut. Meskipun dalam proses penerapannya masih terdapat kendala.

Daftar Pustaka

- Achmad, H. (2020). A review of stunting growth in children: Relationship to the incidence of dental caries and its handling in children. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(6), 230–235. <https://doi.org/10.31838/srp.2020.6.36>
- Amelia, R. R. (2019). Prevalensi Dan Zat Gizi Mikro Dalam Penanganan Stunting. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 6(2), 138–145.
- Bupati Nganjuk. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023*. <http://www.nganjukkab.go.id>
- Dermawan, R. (2018). *Pengambilan Keputusan (Kelima)*. Alfabeta.
- Dini, C. Y., Zakiya, F. F., Apriliani, D., Amelia, A., Windatari, L., R, M. S., A, D. A., Salsabila, A. P., Ramadhan, R. D., Bidari, G. I., & Imron, A. (2022). Penurunan Prevalensi Stunting Di Desa Sudimoroharjo Kabupaten Nganjuk Sebagai Luaran Program Pendampingan Intensif Lintas Sektor Kepada Ibu Dengan Baduta Stunting. *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)*, 1, 221–229. <https://e-journal.unair.ac.id/MGI/article/download/40730/23531>
- Diskominfo Nganjuk. (2022). *Nganjuk Tetapkan Lokus Intervensi Stunting di 28 Desa dari 20 Kecamatan*. <https://jurnaljatim.com/2022/06/nganjuk-tetapkan-lokus-intervensi-stunting-di-28-desa-dari-20-kecamatan/>
- Hadina, H., Hadriani, H., Muliani, M., & Batjo, S. H. (2022). Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting. *Faletahan Health Journal*, 9(02), 176–184. <https://doi.org/10.33746/fhj.v9i02.331>
- Hamidy, F. (2016). Pendekatan Analisis Fishbone Untuk Mengukur Kinerja Proses Bisnis Informasi E-Koperasi. *Jurnal Teknoinfo*, 10(1), 11. <https://doi.org/10.33365/jti.v10i1.12>

- Hidayat, N. R. (2021). *PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN STUNTING*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Pusdatin: buletin stunting*. 1(2).
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021*. <https://doi.org/10.36805/bi.v2i1.301>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*. <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244>
- Lanasa, A. I. M., Nurfakhira, M. A., & Putri, R. D. (2023a). Analisis Kebijakan Stunting Melalui Pendekatan Filsafat dan Pengambilan Keputusan Dalam Penanganan Masalah Kesehatan Anak. *Analisis Kebijakan Stunting*, 1(11), 432–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10300976>
- Lanasa, A. I. M., Nurfakhira, M. A., & Putri, R. D. (2023b). Analisis Kebijakan Stunting Melalui Pendekatan Filsafat dan Pengambilan Keputusan Dalam Penanganan Masalah Kesehatan Anak. *Analisis Kebijakan Stunting*, 1(11), 432–440. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10300976>
- Nisa, L. S. (2018). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 173–179.
- Nurfindarti, E. (2022). Determination of Priority Locus of Handling Stunting and Regional-Based Stunting Management Strategies in Serang City. *Springer Proceedings in Physics*, 275, 843–859. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0308-3_67
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(02), 74–83.
- Ramdhani, A., Handayani, H., & Setiawan, A. (2020). Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Stunting. *Semnas Lppm*, 28–35.
- RI, K. K. (2021). *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021*. In *REPOSITORI BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN*. <https://doi.org/10.36805/bi.v2i1.301>
- Riadi, M. (2018). *Pengambilan Keputusan (Decision Making)*. <https://www.kajianpustaka.com/2018/04/pengambilan-keputusan-decision-making.html>
- Riatma, D. L. (2023). Enhancing Data Quality Management: A Case Study of Screening and Handling Stunting Toddlers in Big Data Applications. *Proceedings - 2023 6th International Conference on Computer and Informatics Engineering: AI Trust, Risk and Security Management (AI Trism), IC2IE 2023*, 303–308. <https://doi.org/10.1109/IC2IE60547.2023.10331211>
- Romza. (2022). *Komitmen Pemkab Nganjuk Turunkan Angka Stunting*. <https://faktualnews.co/2022/06/27/komitmen-pemkab-nganjuk-turunkan-angka-stunting/322847/>
- Simamora, R. S., & Kresnawati, P. (2021). Pemenuhan Pola Makan Gizi Seimbang Dalam Penanganan Stunting Pada Balita Di Wilayah Puskesmas Kecamatan Rawalumbu

- Bekasi. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 11(1), 34–45. <https://doi.org/10.52643/jbik.v11i1.1345>
- Simbolon, D., Soi, B., Ludji, I. D. R., & Bakoil, M. B. (2022). Pendampingan Gizi Spesifik dan Perilaku Ibu dalam Pola Asuh Anak Stunting Usia 6-24 Bulan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(1), 13–24. <https://doi.org/10.14710/jpki.17.1.13-24>
- Suparji. (2024). Handling Stunting in Indonesia: Challenges, Progress and Recommendations. *National Journal of Community Medicine*, 15(2), 161–164. <https://doi.org/10.55489/njcm.150220243546>
- Sutoyo, I. W. (2021). Decision support system for handling intervention on toddlers stunting cases in Indonesia using the certainty factor method. *Journal of Physics: Conference Series*, 1943(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1943/1/012110>
- Utami, S. (2019). Factors associated with interprofessional collaboration for handling stunting in children. *Journal of Global Pharma Technology*, 11(8), 262–267.
- Welis, W. (2022). Effect of Stunting Handling and Physical Activity on Motor Ability and Concentration of School Children. *International Journal of Human Movement and Sports Sciences*, 10(5), 1040–1046. <https://doi.org/10.13189/saj.2022.100522>
- World Health Organization. (2010). *Country Profile Indicators: Interpretation Guide*. <https://www.who.int/>
- Yuda, A. P., Septina, Z., Maharani, A., & Nurdiantami, Y. (2023). Tinjauan Literatur: Perkembangan Program Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 6(2), 53–58. <https://doi.org/10.7454/epidkes.v6i2.6049>